

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi saat ini perkembangan akuntansi dalam bidang keuangan di Indonesia semakin berkembang. Pengelolaan keuangan sepenuhnya ditangani oleh pemerintah daerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem akuntansi di daerah untuk mengatur segala sesuatunya agar aktivitas pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara jujur, transparan, adil, efektif serta efisien. Dalam bidang keuangan perubahan yang signifikan adalah perubahan yang terdapat pada bidang akuntansi pemerintahan yang akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Upaya penerapan *good governance* yang baik, maka haruslah diimbangi dengan *good government* pula. Maksudnya disini, tidak hanya tata kelola pemerintahan saja yang harus di tekankan baik, namun pemerintah juga harus berlaku baik sebagai pelaku pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi dalam suatu organisasi. kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan

atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Fahmi:2012).

Kinerja pemerintahan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintahan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah harus terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (Sutopo dalam LAN, 2002).

Salah satu kinerja pemerintahan yang dinilai dalam pemerintahan adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan / pemerintahan telah melaksanakan dengan baik dan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan suatu pemerintahan daerah merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan yang di analisis dengan alat-alat analisis keuangan yang ada di pemerintahan daerah. Sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Irham Fahmi, 2012:2).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggung jawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintahan daerah. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik diperlukan sistem dan prosedur yang memadai serta pedoman akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Adapun pengertian Laporan Keuangan menurut ahli adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2010:12).

Menurut Irham Fahmi (2012:3), Dimensi yang digunakan dalam mengukur penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dari tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan antara lain adalah melakukan *review*, melakukan perhitungan, melakukan perbandingan, melakukan penafsiran, mencari dan memberikan pemecahan masalah / solusi terhadap masalah yang ditemukan.

Dimensi yang digunakan dalam fenomena ini adalah mencari dan memberikan pemecahan masalah / solusi, dilihat dari hasil opini yang diberikan

oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan dengan peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), berkaitan dengan fenomena yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yaitu masih belum adanya pemecahan masalah (solusi) atau penyelesaian kasus sehingga Kabupaten Bandung Barat masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pemerintah kabupaten bandung barat gagal dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun dengan kesalahan yang sama yaitu pada pengelolaan asset yang diberikan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Bandung Barat.

Terdapat fenomena yang terjadi di kabupaten bandung barat yaitu membahas mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat Pada tahun 2014 kembali mendapatkan opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut H. Abubakar selaku bupati Bandung Barat, opini tersebut diraih kembali karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama, menyangkut pengelolaan asset di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hingga saat ini masih belum ada titik temunya. Menyadari masih adanya kelemahan dalam pemerintah yang dipimpin Abubakar menegaskan akan segera melakukan konsolidasi dan memerintahkan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini secepat mungkin. Dia berharap, Kabupaten Bandung Barat tahun berikutnya bisa lebih baik lagi dan dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah>)

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pun diraih kembali oleh Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015. AA Umbara Sutisna menilai bahwa pengelolaan aset yang merupakan permasalahan utama selain masalah lainnya yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat SD dan SMP serta piutang pajak bumi dan bangunan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat gagal dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu berarti menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan pada tahun 2015 di Kabupaten Bandung Barat masih banyak yang harus dibenahi lagi dan harus ditingkatkan lebih baik lagi agar akuntabilitas keuangan pemerintah daerah bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi ini sudah beberapa tahun pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau telah gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) penilaian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari auditor pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (www.pikiran-rakyat.com)

Berdasarkan fenomena di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bandung Barat masih gagal untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masalah setiap tahunnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu terkait pengelolaan aset, masalah lainnya yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta piutang pajak

bumi dan bangunan yang tak kunjung selesai. Sehingga menunjukkan akuntabilitas keuangan pada pemerintahan Kabupaten Bandung Barat masih kurang baik, dan masih banyak yang harus dibenahi lagi baik dalam perhitungan pencapaian kinerja maupun dalam mencari dan menemukan pemecahan masalah / solusi agar pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar lebih baik lagi.

Akuntabilitas keuangan (*financial*) sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar agar lebih transparan. Dengan kata lain akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dalam menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah ke dalam laporan keuangan daerah, baik sebagai bahan evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah maupun sebagai gambaran kinerja keuangan atas laporan keuangan pemerintahan.

Pengelolaan suatu sistem informasi yang berkualitas akan menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik. Sistem informasi adalah salah satu komponen terpenting dalam pemerintahan karena pada dasarnya sistem informasi telah diimplementasikan di banyak perusahaan termasuk dalam pemerintahan dengan biaya yang besar, selain mampu memberikan kemudahan dan menyelesaikan

pekerjaan juga mempercepat penyelesaian pekerjaan dan memperkecil jarak dalam penyampaian informasi. Suatu sistem informasi akuntansi yang baik juga sangat diperlukan, karena sistem informasi akuntansi merupakan pendukung utama terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (*accountable*), dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat di pertanggungjawabkan.

Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa Laporan Keuangan. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja keuangan (Mardiasmo, 2009:21).

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan, sasaran

pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Abdul Halim (2008:254).

Fenomena yang terjadi di kabupaten bandung barat yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016 mendapat predikat CC atau memperoleh nilai 57,91 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hal ini disebabkan karena masih adanya beberapa aplikasi yang harus di perbaiki lagi, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih perlu mendapat perhatian dan masih banyak perbaikan. Walaupun begitu Bupati Bandung Barat Abubakar bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada para pegawainya. Pasalnya, LAKIP Pemkab Bandung Barat memiliki perbaikan paling signifikan dibandingkan pemerintah kabupaten/kota lainnya.

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/01/26/predikat-lakip-dapat-cc-bupati-abubakar-tak-kecewa-391804>

Pemerintah kabupaten Bandung Barat tahun 2017 mendapat predikat B (baik) dengan nilai 64,88. Itu artinya naik dibandingkan tahun 2016 yang hanya mendapat predikat CC dengan nilai 57,91. Hal itu disebabkan penilaian berdasarkan hasil evaluasi atas LAKIP dan penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah kabupaten Bandung Barat sudah menunjukkan hasil yang baik.

Penilaian tersebut tidak hanya diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tapi semua pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kementerian. "Pencapaian predikat B ini tentunya sangat membanggakan karena mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Itu artinya kinerja Pemkab Bandung Barat semakin membaik dan harus terus membaik," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB Adiyoto di Ngamprah, Selasa (31/1).

<http://www.galamedianews.com/bandung-roya/177827/sakip-pemkab-bandung-barat-dapat-predikat-b.html>

Dari fenomena di atas dapat dilihat dan dapat kita tarik kesimpulan yaitu bahwa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat membanggakan karena pada tahun 2017 penilaian kinerja di Kabupaten Bandung Barat sudah lebih baik diantara kabupaten / kota lainnya di Jawa Barat, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berhasil mendapat predikat B (baik) dengan nilai 64,88 dan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat predikat CC dengan memperoleh nilai 57,91 pada tahun 2016. Dan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah kabupaten Bandung Barat sudah menunjukkan hasil yang baik. Dimensi yang digunakan dalam fenomena ini yaitu Akuntabilitas Keuangan mengenai penilaian kinerja keuangan, hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian kerjanya dari tahun sebelumnya.

Adapun penjelasan menurut kebijakan tindak lanjut pelaksanaan peraturan presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menyatakan kategori LAKIP sebagai berikut:

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	>0-30

Tabel 1.1 Kategori penilaian

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), telah mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas. salah satunya yaitu pada akuntabilitas keuangan. Keberhasilan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan berpengaruh besar dalam upaya mewujudkan (tata kelola pemerintahan yang baik) *Good Government Governance*. (Arso : 2012)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah berpengaruh positif dalam mewujudkan terciptanya *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Karena untuk mewujudkan pemerintahan menjadi *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) salah satu upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah itu sendiri.

Implementasi *Good Government Governance (GGG)* dalam pemerintahan secara sederhana adalah dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance (GGG)* ke dalam sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan benar. *Good Government Governance (GGG)* sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak terhenti hanya sampai pemahaman saja, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam langkah kongkret sehingga dapat memberikan manfaat pada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan. Oleh karena itu untuk menghasilkan pemerintahan yang baik maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance (GGG)* secara nyata. Adapun pengertian *Good Government Governance (GGG)* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009).

Menerapkan praktik *good government governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good government governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik juga memiliki beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan *good government governance*, misalnya pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua faktor dari unsur *good government governance*.

Penelitian Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat di dalam pemerintahan daerah, yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih mampu beradaptasi, mempunyai ketahanan, mampu

melakukan perubahan arah dengan cepat, dan memusatkan perhatiannya kepada pelayanan masyarakat. Seperti Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia ini sebagai salah satu pemekaran dari Kabupaten Bandung sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat mewarisi kurang lebih sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sangatlah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam organisasi, karena sumber daya manusia sebagai faktor yang berperan aktif dalam mencapai visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit kerja di dalam pemerintahan melalui pengukuran kinerja diharapkan pegawai dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat progres yang direncanakan dengan kenyataan. Apabila terdapat progres yang lebih rendah daripada rencana, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memacu kegiatan agar tujuan yang diharapkan dicapai.

Keberhasilan suatu pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) selain diukur dari kinerja keuangan juga dapat diukur dengan melihat akuntabilitas pengelola keuangannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Jadi *Good Government Governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja keuangan karena apabila *Good Government Governance* baik, maka akuntabilitas pengelola

keuangannya akan baik dan kinerja keuangan pemerintah daerahnya pun juga akan baik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari judul penelitian Nurhayati Soleha (2014) yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi pada SKPD Kabupaten / Kota Provinsi Banten). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan pengembangan penelitian terdahulu yaitu pada periode penelitian dan tempat penelitian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengetahui hubungan antara variabel tersebut pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung Barat dengan mengambil judul yaitu : **“Pengaruh Implementasi *Good Government Governance (GGG)* Terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi *Good Government Governance (GGG)* pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.
2. Bagaimana Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.
4. Seberapa besar pengaruh Implementasi *Good Government Governance (GGG)* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Implementasi *Good Government Governance (GGG)* terhadap Akuntabilitas Keuangan dan dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi *Good Government Governance (GGG)* pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Implementasi *Good Government Governance (GGG)* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Implementasi *Good Government Governance (GGG)* terhadap Akuntabilitas Keuangan dan dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh Implementasi *Good Government Governance (GGG)* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, dapat juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan praktik yang sebenarnya di dalam Pemerintahan Daerah yang selanjutnya sebagai bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut. Selain itu, penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pasundan Bandung. Berguna untuk menambah wawasan khususnya mengenai pengaruh Implementasi *Good Government Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pemerintahan daerah, sehingga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajerial.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi untuk membantu dan memberikan gambaran lebih jelas bagi para peneliti yang melakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana pengaruh Implementasi *Good Government Governance (GGG)* terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sutrisno (2009:53) tentang pengertian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

“Kinerja Keuangan adalah prestasi yang dicapai perusahaan / pemerintahan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan / pemerintahan tersebut.”

Menurut Irham Fahmi (2012:2) Kinerja Keuangan yaitu :

“Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan / pemerintahan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan / pemerintahan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu perusahaan / pemerintahan, dengan menggunakan peraturan-peraturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar serta mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang beralamat di Jalan Padalarang Cisarua KM. 2 Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dan peneliti juga menggunakan pendekatan survey pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisisioner untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka waktu penelitian dilaksanakan peneliti pada waktu yang

telah ditentukan oleh Pemerintah hingga selesai.